

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bagian dari usaha pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan hingga pada tingkat daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah tersebut maka masing-masing instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut, diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan dengan hal itu diperlukan adanya gerakan dan pengembangan yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut menyangkut reformasi sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah. (Ferra Pratiwi Zai, S et al., 2020).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur yang menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dalam membuat keputusan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi, di mana nantinya dijadikan sebagai sumber informasi dalam menilai kinerja suatu organisasi. (Armel et al., 2017). Laporan keuangan yang terjadi di pemerintahan menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah tercermin dari tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Mia et al., 2016).

Pada kenyataannya sudah menjadi fenomena bahwa didalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal pemerintahan, dan juga masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mana dari permasalahan tersebut akan berdampak positif ataupun negatif terhadap laporan keuangan. Terlebih khusus kepada pemerintahan yang memiliki laporan keuangan yang tidak berkualitas. Pemerintahan yang memiliki laporan keuangan yang tidak berkualitas ini akan lebih memiliki banyak kendala-kendala dari lemahnya atau rusaknya suatu laporan keuangan tersebut.

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini fenomena yang terjadi adalah adanya 13 Kabupaten/Kota yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Laporan Keuangan yang diterima memperoleh Hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian itu sendiri masih banyak terjadinya kesalah pahaman oleh sebagian kalangan. Opini yang diberikan oleh pemeriksa termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan merupakan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan

timbulnya fraud dikemudian hari melainkan opini tersebut merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikerahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah pada setiap daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Pada Pemerintahan Kota Padang Panjang masalah yang ditimbulkan yaitu pengelolaan Dana Bergulir oleh Badan Layanan Umum Daerah Kota Padang Panjang yang belum Memadai dan Penyajian Investasi Non Permanen pada Neraca tidak menggambarkan nilai yang wajar. (<https://sumbar.bpk.co.id>)

Selain itu juga terdapatnya potongan PFK bendahara pengeluaran Dinas Pemuda Dan Olahraga belum disetor ke kas negara dan digunakan untuk pembayaran belanja kegiatan. (<https://sumbar.bpk.go.id/>)

Oleh karena itu penulis mengangkat topik *Good Government Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan karena menurut peneliti masalah tersebut merupakan masalah yang harus diperhatikan bagi pemerintahan saat ini.

Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan. *Good Government Governance* merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. (Sap & Dan, 2020). *Good Government Governance* memiliki prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi

hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.

Menurut (Yudhasena & Putri, 2019) dengan melaksanakan *Good Government Governance*, salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkatkan kinerja melalui tercapainya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik. Pengelolaan keuangan pemerintah telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penerapan *good governance* turut memberikan andil pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penerapan *Good Government Governance* dalam menyusun dan mengelola suatu laporan keuangan yang baik dan juga berkualitas, yang dimana penerapan *Good Government Governance* turut memberikan andil terhadap laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah yang diterapkan didalam lingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Sap & Dan, 2020). Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mengatur penyajian laporan keuangan dalam meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Untuk mencapai hal tersebut, Standar akuntansi pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016).

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Kegagalan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang 4 yang ditetapkan pemerintah (Arifin, 2017). Selain itu Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya

pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Ketidakhahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dan didukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya pemerintahan yang baik. (Rahmayani, 2020)

Selain Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal juga memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Menurut (Faishol & Lamongan, 2016) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern terdiri atas

kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Rahmawati et al., 2018). Pengendalian Internal bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi termasuk kualitas laporan keuangan, mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan mudah dalam mengendalikan dan mengawasi jalannya operasional organisasi.

Pengendalian internal pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi. Sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit sehingga dapat mewujudkan keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti masih terdapatnya kesenjangan atau ketidak konsistenan yang ditemukan selain hal tersebut juga terdapat faktor-faktor positif atau negatif yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan hasil antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Kualitas**

Informasi Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Intervening: Penerapan *Good Government Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan
2. Adanya penyimpangan-penyimpangan yang berdampak positif ataupun negative terhadap Laporan Keuangan
3. Adanya kendala-kendala yang timbul dari suatu pemerintahan yang memiliki laporan keuangan yang tidak stabil dan berkualitas
4. Adanya terjadi kesalahpahaman terhadap opini wajar tanpa pengecualian oleh sebagian kalangan
5. Terdapatnya pengelolaan dana bergulir oleh Badan Layanan Umum Daerah yang belum memadai dan penyajian investasi non permanen pada neraca tidak menggambarkan nilai yang wajar.
6. Terdapatnya potongan PFK bendahara pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga belum disetor ke kas negara dan digunakan untuk pembayaran belanja kegiatan

7. Terdapatnya perubahan pengelolaan keuangan yang terdapat didalam suatu pemerintahan yang berdampak pada laporan keuangan
8. Terdapatnya Kegagalan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi yang berdampak pada kekeliruan laporan keuangan
9. Adanya Ketidak pahaman aparatur pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
10. Terdapatnya pencapaian-pencapaian yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis memberi batasan masalah agar penulisan ini lebih terarah, sesuai dengan penelitian dan tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan. Batasan masalah bertujuan untuk mendapatkan temuan yang lenih fokus dan menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang melebar. Penelitian yang berjudul Kualitas Informasi Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Intervening: Penerapan *Good Government Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?
3. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Siginifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?
4. Bagaimana *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?
5. Bagaimana Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?
6. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?
7. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?
8. Bagaimana *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Intervening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?

9. Bagaimana Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Intervening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?
10. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Intervening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi Bagaimana Diduga Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi Bagaimana Diduga Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Signifikan terhadap Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Padang Panjang

4. Untuk mengetahui dan mengestimasi Bagaimana Diduga *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi Bagaimana Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang
7. Untuk mengetahui dan mengestimasi Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang?
8. Untuk mengetahui dan mengestimasi Bagaimana *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Intervening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang

9. Untuk mengetahui dan mengestimasi Bagaimana Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Intervening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang
10. Untuk mengetahui dan mengestimasi Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Intervening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu akuntansi keuangan, khususnya *Good Government Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya manusia, serta dapat membandingkan teori-teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya di dalam keuangan.

2. Bagi Perusahaan

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dari data yang telah dikumpulkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam pengembangan dan perbaikan nilai perusahaan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini menjadi kontribusi dan bahan perbandingan serta referensi bagi semua pihak yang melanjutkan penelitian sebelumnya.